

EMPAT PILAR KEUNTUNGAN APLIKASI PENDAPATAN DAERAH: MEMUDAHKAN, MENSIMPLIFIKASI, MEMPERCEPAT, DAN MENGOPTIMALKAN DI BAPENDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Mila Nor Elijha¹, Syamsir², Rahmatul Ilham³, Delta Dea Ananta⁴, Zahir Fikri Rashief Azwar⁵
^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: milaeiza07@gmail.com

Article History

Received: 15-12-2025

Revision: 05-01-2026

Accepted: 09-01-2026

Published: 14-01-2026

Abstract. This study aims to identify and analyze the main benefits of implementing the E-Regional Revenue (E-Pendapatan Daerah) application in managing regional revenue, particularly revenue derived from local taxes and retributions. The research problem arises from the persistence of manual, complex, and inefficient payment and reporting processes, which may hinder the optimization of regional revenue management. This study employs a descriptive qualitative approach using a case study method. The research subjects are regional revenue management institutions that have implemented the E-Regional Revenue application. The informants include system administrators, policy-making officials, and technical officers directly involved in the operation and utilization of the application. The selection of research subjects was conducted using purposive sampling, based on their direct involvement and relevance to the research objectives. Data collection techniques consisted of document analysis, in-depth interviews, and limited observation of the application-based revenue management process. Data analysis techniques were carried out using qualitative descriptive analysis, involving data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source triangulation to ensure data validity. The findings indicate that the implementation of the E-Regional Revenue application provides four major benefits. First, service convenience is achieved through online payment facilities that eliminate the need for taxpayers to visit service offices, thereby improving time and cost efficiency. Second, complex bureaucratic procedures are simplified through transaction automation. Third, the application accelerates the availability of reports and information systems in real time. Fourth, accurate and timely data supports optimized decision-making by leaders without reliance on manual reports. In conclusion, the E-Regional Revenue application functions not only as a technical payment tool but also as a strategic instrument that enhances operational efficiency and accountability in regional government financial management.

Keywords: E-Revenue Application, Regional Tax, Levies, Efficiency, Decision Making

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis manfaat utama dari implementasi aplikasi E-Pendapatan Daerah dalam pengelolaan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Permasalahan penelitian berangkat dari masih ditemukannya proses pembayaran dan pelaporan penerimaan daerah yang bersifat manual, berbelit, dan kurang efisien, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian adalah instansi pengelola pendapatan daerah yang telah mengimplementasikan aplikasi E-Pendapatan Daerah, dengan informan utama meliputi aparatur pengelola sistem, pejabat pengambil kebijakan, serta petugas teknis terkait. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling, berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi E-Pendapatan Daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi terbatas terhadap proses pengelolaan penerimaan daerah berbasis aplikasi. Teknik analisis data

menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung oleh triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi E-Pendapatan Daerah memberikan empat pilar manfaat utama. Pertama, kemudahan layanan diwujudkan melalui sistem pembayaran online yang mengurangi kebutuhan wajib pajak untuk datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Kedua, proses birokrasi yang kompleks berhasil disederhanakan melalui otomatisasi pengelolaan transaksi. Ketiga, aplikasi ini mempercepat penyediaan laporan dan sistem informasi secara real-time. Keempat, ketersediaan data yang akurat dan cepat mendukung optimalisasi pengambilan keputusan pimpinan tanpa ketergantungan pada laporan manual. Kesimpulannya, aplikasi E-Pendapatan Daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Aplikasi E-Pendapatan, Pajak Daerah, Retribusi, Efisiensi, Pengambilan Keputusan

How to Cite: Elijha, M. N., Syamsir., Ilham, R., Ananta, D. D., & Azwar, Z. F. R. (2026). Empat Pilar Keuntungan Aplikasi Pendapatan Daerah: Memudahkan, Mensimplifikasi, Mempercepat, dan Mengoptimalkan di Bapenda Provinsi Sumatera Barat. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (1), 554-562. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i1.4810>

PENDAHULUAN

Penerapan sistem informasi digital dalam tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan langkah strategis yang vital untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi. Namun, ambisi besar untuk membangun sistem yang terintegrasi dan andal selalu diiringi oleh tantangan teknis yang kompleks. Sebuah sistem aplikasi yang canggih sekalipun dapat kehilangan kredibilitasnya jika tidak didukung oleh mekanisme penanganan kendala teknis yang cepat dan efektif. Gangguan teknis sekecil apa pun pada sistem pelayanan publik, seperti yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan retribusi, dapat secara langsung mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan bahkan berpotensi merusak performa serta kredibilitas institusi di mata publik (Rahmadanita & Dowa, 2021).

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi dan keberlanjutan sebuah sistem informasi sangat bergantung pada strategi yang dipilih dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi tersebut. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan utama: pengembangan sistem oleh pihak eksternal (pihak luar/konsultan) atau pembangunan sistem secara mandiri (in-house development). Pilihan strategi ini memiliki konsekuensi langsung terhadap kecepatan penanganan masalah dan efisiensi biaya operasional (Arribe & Aulia, 2022).

Lebih dari sekadar mengatasi kendala teknis, penting untuk memahami arsitektur dan struktur sistem informasi yang diterapkan. Aplikasi pendapatan bukanlah sebuah entitas tunggal, melainkan merupakan aplikasi payung (top application) yang membawahi berbagai sub-aplikasi (sub-applications) yang mengelola jenis-jenis pendapatan daerah secara spesifik. Untuk tingkat provinsi, misalnya, Aplikasi E-Pendapatan berada di puncak hierarki, menaungi setidaknya lima sub-aplikasi penting, termasuk Aplikasi E-Samsat (untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik (Jatmika & Ak, 2025), Aplikasi Pajak Bahan Bakar, Aplikasi Air Permukaan, dan Aplikasi Alat Berat. Struktur hierarki ini menunjukkan kompleksitas dan luasnya cakupan sistem yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPD) Sistem Informasi Pendapatan (SIPD) di bawah Bapenda (Lovianna & Rahmi, 2022).

Artikel ini akan mengulas secara mendalam dua aspek krusial dalam keberhasilan digitalisasi pendapatan daerah: Pertama, pentingnya strategi pengembangan mandiri (in-house) dalam memastikan ketersediaan sumber daya internal yang lengkap dan mampu menangani kendala teknis dengan cepat, sebagai kontra-pola terhadap model ketergantungan konsultan yang mahal (high cost) dan lambat. Kedua, menganalisis struktur arsitektur Aplikasi E-Pendapatan Daerah sebagai aplikasi payung yang mengintegrasikan berbagai sub-aplikasi spesifik, serta peran UPD SIPD sebagai unit yang bertanggung jawab penuh dalam implementasi sistem ini (Roza et al., 2021). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan in-house dan desain arsitektur sistem Aplikasi E-Pendapatan Daerah, serta implikasinya terhadap efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan secara mendalam fenomena atau konteks tertentu, yaitu manfaat utama aplikasi, strategi penanganan kendala teknis, serta struktur arsitektur sistem informasi pendapatan di tingkat regional (Waruwu, 2024). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi langsung dengan narasumber yang merupakan pihak berwenang dan pelaksana sistem informasi pendapatan di lingkungan pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pejabat terkait untuk menggali informasi secara mendalam mengenai:

- Manfaat utama aplikasi E-Pendapatan (Memudahkan, Mensimplifikasi, Mempercepat, Mengoptimalkan). Strategi yang diterapkan dalam mengatasi kendala teknis, termasuk alasan pemilihan pengembangan sistem secara mandiri (in-house) versus penggunaan konsultan.
- Struktur organisasi dan arsitektur sistem (aplikasi top dan sub-aplikasi). Peran Unit Pelaksana Teknis (UPD) Sistem Informasi Pendapatan (SIPD) sebagai penanggung jawab implementasi.

Data kualitatif yang terkumpul melalui wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yang berfokus pada:

- Identifikasi Tema Kunci: Mengidentifikasi empat pilar keuntungan aplikasi (Memudahkan, Mensimplifikasi, Mempercepat, Mengoptimalkan).
- Kajian Strategi Pengembangan: Menganalisis alasan logis di balik keputusan pengembangan sistem secara mandiri (in-house), termasuk pertimbangan high cost dan ketergantungan pada pihak luar, serta dampaknya terhadap kecepatan penanganan masalah teknis.
- Pemetaan Arsitektur Sistem: Mendeskripsikan dan memetakan struktur hierarki Aplikasi E-Pendapatan Daerah, yang terdiri dari aplikasi utama dan berbagai sub-aplikasi di bawahnya (seperti E-Samsat, Pajak Bahan Bakar, dll.).

Tujuannya adalah untuk menyajikan temuan secara terperinci dan sistematis guna mendukung kesimpulan mengenai efektivitas dan keberlanjutan Aplikasi E-Pendapatan Daerah.

Tabel 1. Hasil rangkuman wawancara

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana cara mengatasi kendala teknis yang terjadi dalam sistem informasi?	Kendala teknis diatasi dengan memastikan ketersediaan sumber daya internal. Sistem dibangun secara mandiri oleh tim internal sehingga perbaikan dapat dilakukan dengan cepat tanpa menunggu pihak luar.
Mengapa pembangunan sistem dilakukan secara mandiri, bukan menggunakan pihak luar?	Karena lebih efisien dari segi biaya dan tidak menimbulkan ketergantungan pada konsultan. Penanganan masalah juga menjadi lebih cepat.
Apa dampak jika terjadi gangguan pada sistem informasi pelayanan?	Gangguan sistem dapat langsung menghambat pelayanan kepada masyarakat dan mempengaruhi performa institusi.
Faktor apa yang menentukan cepat atau lambatnya penanganan masalah teknis? Apa yang dimaksud dengan aplikasi e-Pendapatan?	Kelengkapan dan kesiapan sumber daya manusia internal. Aplikasi e-Pendapatan merupakan aplikasi utama yang menaungi berbagai sub-aplikasi pendapatan daerah.

Pertanyaan	Jawaban
Sub-aplikasi apa saja yang berada di bawah aplikasi e-Pendapatan?	Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, pajak alat berat, dan aplikasi pendapatan lainnya.
Siapa yang bertanggung jawab terhadap implementasi sistem informasi pendapatan?	Unit Pelaksana Daerah (UPD) atau SIPD di bawah Bapenda.
Di mana informasi lebih lengkap mengenai sistem dan organisasi dapat diakses?	Melalui website resmi yang memuat struktur organisasi, sejarah, dan kegiatan harian.

Sumber: Hasil Wawancara 12 Mei 2025

HASIL

Implementasi Empat Pilar Keuntungan Aplikasi E-Pendapatan

Implementasi Aplikasi E-Pendapatan Daerah terbukti menghasilkan manfaat signifikan yang dikristalisasi melalui empat pilar keuntungan utama, yaitu memudahkan, mensimplifikasi, mempercepat, dan mengoptimalkan.

- Memudahkan dan mensimplifikasi proses: aplikasi ini secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Manfaat ini diwujudkan melalui layanan pembayaran yang memungkinkan wajib pajak membayar di mana saja tanpa harus datang ke loket pelayanan. Hal ini menghasilkan efisiensi ganda, yaitu efisiensi waktu dan efisiensi biaya bagi masyarakat. Di sisi institusi, aplikasi ini mensimplifikasi proses dengan mengotomatisasi penanganan transaksi pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari pajak dan retribusi. Dengan demikian, proses birokrasi yang sebelumnya kompleks dan memakan waktu berhasil dipangkas (Leliya & Afiah, 2016).
- Mempercepat dan mengoptimalkan pengambilan keputusan: efisiensi di tingkat transaksi secara simultan memberikan dampak positif ke tingkat manajerial. Aplikasi ini mempercepat penyediaan laporan dan sistem informasi pelaporan secara real-time. Kecepatan penyediaan data ini kemudian mengarah pada pilar keempat, yaitu mengoptimalkan pengambilan keputusan. Pimpinan institusi tidak perlu lagi meminta laporan secara manual (minta-minta laporan ke bawah) karena sistem informasi pengambilan keputusan sudah otomatis terbangun di dalam aplikasi. Percepatan ini krusial dalam menjaga performa institusi (Fauzi, 2024).

Strategi Penanganan Kendala Teknis

Pengembangan Mandiri (*In-House*): Keberhasilan operasional Aplikasi E-Pendapatan sangat bergantung pada kemampuan institusi untuk mengatasi kendala teknis dengan cepat. Institusi telah memilih strategi pengembangan sistem secara mandiri (*in-house development*), alih-alih menyerahkan kepada pihak luar atau konsultan.

- Kesiapan sumber daya internal dan kecepatan penanganan: keputusan pengembangan mandiri didasarkan pada pentingnya kesiapan sumber daya manusia internal. Semua tenaga pengembang (*developer*) dan programmer merupakan tenaga internal yang berada di institusi. Keuntungan utama dari strategi ini adalah kecepatan penanganan masalah. Jika terjadi masalah teknis, tenaga internal dapat langsung memperbaikinya dengan cepat, tanpa harus bergantung pada pihak eksternal.
- Efisiensi Biaya dan Menghindari Ketergantungan: Strategi pengembangan mandiri dipilih karena pola kerja menggunakan konsultan (*hire*) memiliki dua kelemahan utama: biaya yang mahal (*high cost*) dan menimbulkan ketergantungan. Jika terjadi masalah saat menggunakan konsultan, institusi harus memanggil konsultan lagi, yang berarti mengeluarkan biaya tambahan (uang lagi). Sebaliknya, dengan memiliki tenaga sendiri, penanganan masalah menjadi lebih cepat dan efisien secara biaya.

Dampak pada Performa Institusi

Penanganan masalah yang cepat sangat penting karena gangguan teknis sekecil apa pun dapat mengganggu pelayanan di tengah masyarakat. Pelayanan yang terganggu akan berdampak langsung pada performa institusi, yang pada akhirnya dapat dipertanyakan oleh publik. Oleh karena itu, penanganan cepat menjadi faktor penentu utama keberlanjutan operasional.

Arsitektur dan Struktur Sistem Informasi Pendapatan

Aplikasi E-Pendapatan Daerah tidak beroperasi sebagai sistem tunggal, melainkan sebagai aplikasi payung atau yang disebut sebagai aplikasi top.

Struktur Hierarki Aplikasi

Aplikasi Pendapatan berfungsi sebagai bagian paling atas, di mana di bawahnya terdapat sejumlah sub-aplikasi (*sub-systems*). Untuk tingkat provinsi, setidaknya terdapat lima sub-aplikasi yang dikelola di bawah payung Aplikasi E-Pendapatan yaitu (1) aplikasi e-samsat (untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama), (2) aplikasi alat berat, (3) aplikasi pajak bahan bakar, dan (4) aplikasi pajak air permukaan.

Unit Pelaksana Teknis

Unit yang bertanggung jawab penuh atas implementasi sistem informasi pendapatan adalah UPD (Unit Pelaksana) SIPD (Sistem Informasi Pendapatan). UPD SIPD merupakan sub-bagian di bawah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang bertanggung jawab dalam menghandle dan mengimplementasikan sistem informasi pendapatan. Regulasi yang mengatur unit pelaksana ini adalah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 tahun 2023.

DISKUSI

Relevansi Empat Pilar Keuntungan dalam Konteks E-Governance

Temuan mengenai empat pilar keuntungan memudahkan, mensimplifikasi, mempercepat, dan mengoptimalkan, selaras dengan tujuan inti dari inisiatif *E-Governance* secara global. Peningkatan efisiensi waktu dan biaya bagi wajib pajak melalui layanan pembayaran daring (online) secara langsung memenuhi dimensi Peningkatan Kualitas Layanan Publik yang menjadi fokus utama dalam literatur *e-government* (Nugroho & Purbokusumo, 2020).

Pilar Mensimplifikasi yang tercermin dalam otomatisasi penanganan transaksi menunjukkan transisi dari model birokrasi kaku menuju model layanan yang berorientasi proses. Pilar Mempercepat pelaporan dan Mengoptimalkan pengambilan keputusan menegaskan peran aplikasi sebagai alat strategis, bukan hanya administratif. Hal ini mendukung pandangan bahwa sistem informasi yang terintegrasi (seperti Aplikasi E-Pendapatan) adalah fondasi bagi Pengambilan Keputusan Berbasis Data (*Data-Driven Decision Making*), yang merupakan aspek penting dari *e-governance* yang efektif (Hameed et al., 2012). Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat aplikasi telah bergerak dari efisiensi operasional semata menuju dukungan strategis tingkat atas.

Strategi Pengembangan Sistem Mandiri (*In-House*) dan Manajemen Risiko

Keputusan institusi untuk memilih strategi pengembangan sistem secara mandiri (*in-house development*) merupakan titik diskusi yang signifikan. Penelitian terdahulu seringkali menyoroti pro dan kontra antara pengembangan *in-house* dan *outsourcing* (Lacity & Willcocks, 2017). Temuan penelitian ini sangat kuat mendukung model *in-house* dengan dua argumen utama: Pengurangan Biaya Tinggi (*High Cost*) dan Kecepatan Penanganan Masalah. Ketergantungan pada konsultan eksternal (*outsourcing*), seperti yang disinggung narasumber, sering kali berimplikasi pada *high cost* dan menciptakan ketergantungan yang lambat dalam respons. Sebaliknya, memiliki sumber daya internal (*developer dan programmer*) memungkinkan penanganan masalah teknis dilakukan dengan lebih cepat dan langsung.

Dalam konteks pelayanan publik, di mana gangguan teknis sekecil apa pun dapat mengganggu pelayanan dan memengaruhi performa institusi, kecepatan penanganan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, strategi *in-house* yang memastikan ketersediaan sumber daya dan respons cepat berfungsi sebagai mekanisme Manajemen Risiko yang efektif untuk menjaga kontinuitas layanan dan kredibilitas institusi. Pilihan ini selaras dengan prinsip Kemandirian Teknologi dalam implementasi TIK pemerintah (Nurhakim, 2014).

Implikasi Arsitektur Sistem dan Keberlanjutan

Arsitektur sistem Aplikasi E-Pendapatan sebagai aplikasi top yang menaungi berbagai sub-aplikasi (seperti E-Samsat, Alat Berat, dan Pajak Bahan Bakar) menunjukkan adanya Integrasi Sistem Horizontal. Pola ini mencerminkan kebutuhan untuk menyatukan berbagai jenis pendapatan daerah di bawah satu payung manajemen. Integrasi semacam ini penting untuk menghindari fragmentasi data yang sering menjadi masalah dalam TIK pemerintah yang dikembangkan secara terpisah-pisah (*silo system*). Adanya UPD SIPD sebagai unit penanggung jawab implementasi sistem informasi pendapatan sesuai dengan literatur mengenai Struktur Tata Kelola TIK (IT Governance Structure). Penunjukan unit khusus memastikan adanya akuntabilitas yang jelas dan fokus sumber daya untuk implementasi sistem yang kompleks. Keberadaan unit ini, yang diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023, menunjukkan komitmen formal institusi terhadap keberlanjutan dan pemeliharaan sistem.

KESIMPULAN

Implementasi Aplikasi E-Pendapatan Daerah terbukti berhasil mentransformasi tata kelola penerimaan daerah dengan mewujudkan empat pilar keuntungan utama: Memudahkan, Mensimplifikasi, Mempercepat, dan Mengoptimalkan. Aplikasi ini secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi wajib pajak dengan memungkinkan pembayaran daring, sekaligus mensimplifikasi proses transaksi pajak dan retribusi. Dampak strategisnya terlihat dari percepatan penyediaan laporan dan otomatisasi sistem informasi, yang esensial untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Lebih lanjut, keberlanjutan dan keandalan sistem didukung oleh strategi pengembangan mandiri (*in-house*). Strategi ini menjamin kesiapan sumber daya internal (*developer dan programmer*) untuk menangani kendala teknis secara cepat, yang sangat krusial mengingat gangguan sekecil apa pun dapat mengganggu pelayanan dan menurunkan performa institusi. Arsitektur Aplikasi E-Pendapatan sebagai aplikasi payung (*top application*) yang menaungi berbagai sub-aplikasi (seperti E-Samsat, Alat Berat, dan Pajak Bahan Bakar) menunjukkan integrasi sistem yang komprehensif.

Seluruh implementasi sistem ini berada di bawah tanggung jawab Unit Pelaksana (UPD) Sistem Informasi Pendapatan (SIPD), yang menunjukkan adanya struktur tata kelola yang jelas dan komitmen institusi terhadap digitalisasi pendapatan daerah.

REFERENSI

- Arribe, E., & Aulia, S. (2022). Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi Signal Nasional Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction (EUCS) (Studi Kasus: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau (BAPENDA). *Journal of Software Engineering and Information System (SEIS)*, 86–95.
- Fauzi, I. R. (2024). Analisis Risiko Operasional pada Proses Pengiriman Barang melalui Penerapan Enterprise Risk Management (ERM) (Studi Kasus: Kantor POS Cianjur). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 5287–5301.
- Hameed, M. A., Counsell, S., & Swift, S. (2012). A Meta-Analysis of Relationships Between Organizational Characteristics and IT Innovation Adoption in Organizations. *Information & Management*, 49(5), 218–232.
- Lacity, M., & Willcocks, L. (2017). Conflict Resolution in Business Services Outsourcing Relationships. *The Journal of Strategic Information Systems*, 26(2), 80–100.
- Leliya, L., & Afiyah, F. (2016). Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak Daerah Online dalam Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Bapenda DKI Jakarta Tahun).
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(1), 1–17.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3), 403–422.
- Rahmadanita, A., & Dowa, P. P. C. (2021). Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerapan Aplikasi e-PBB di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 3(2), 51–69.
- Roza, V. D., Yuliani, F., & Adianto, A. (2021). Innovative Governance dalam Pelayanan Perpajakan (Studi pada Penerapan Aplikasi E-Bphtb di Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 6(1), 152–167.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Windy Jatmika, S. E., & Ak, M. (2025). *Buku Ajar Optimalisasi dan Strategi Pengembangan Bisnis*. CV Eureka Media Aksara.